

PROPOSAL

GERAKAN SOSIAL HIZBUT TAHRIR DI INDONESIA PASCA PEMBUBARAN
(Studi Eks HTI Bengkulu)

DISUSUN OLEH :

Nama	Dra. Nurul Fadhilah, M.Pd
NIP	196109071989022002
Nama	Sepri Yunarman, M.Si
NIP	199002102019031015
Nama	Tri Wulandari
NIM	1811270001

DIUSULKAN DALAM PROJEK KEGIATAN PENELITIAN
LITAPDIMAS KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2021

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

2021

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	Dra. Hj. Nurul Fadhilah, M.Pd
NIP	196109071989022002
Nama	Sepri Yunarman, M.Si
NIP	199002102019031015
Nama	Tri Wulandari
NIM	1811270001

Adalah benar, sebagai pengusul proposal penelitian yang berjudul “Gerakan Sosial Hizbut Tahrir di Indonesia Pasca Pembubaran (Studi Eks HTI Bengkulu)” serta bertanggungjawab dalam melaksanakan kegiatan penelitian.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan seperlunya sesuai aturan.

Dibuat di Bengkulu pada tanggal 27 April 2021

Ketua Pengusul

Dra. Hj. Nurul Fadhilah, M.Pd

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERNYATAAN

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Penelitian Terdahulu.....
- F. Kerangka Teoritis
- G. Metode Penelitian.....
- H. Sistematika Penulisan.....
- I. Daftar Bibliografi
- J. Timeline Penelitian.....
- K. Rencana Anggaran

GERAKAN SOSIAL HIZBUT TAHRIR DI INDONESIA PASCA PEMBUBARAN

(Studi Eks HTI Bengkulu)

A. Latar belakang

Gerakan reformasi pada tahun 1998 telah membuka kran kebebasan sosial politik bagi warga negara Indonesia. Setelah lebih kurang 32 tahun dikungkung oleh rezim militeristik orde baru, maka bangsa Indonesia dapat menyongsong era keterbukaan dan kebebasan di segala lini kehidupan masyarakat, termasuk dijaminnya kebebasan warga negara untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 e Ayat 3 UUD 1945.

Akibatnya, animo masyarakat untuk mendirikan ormas sebagai wadah perkumpulan, baik perkumpulan sosial, ekonomi, politik dan keagamaan sangat tinggi. Bahkan menurut Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, hingga tahun 2018 ini, total jumlah ormas yang terdaftar di tingkat pusat sudah mencapai 406.700 ormas. Mayoritas ormas tersebut juga memiliki struktur sampai tingkat provinsi, kabupaten kota, kecamatan bahkan hingga kelurahan/desa.¹

Salah satu ormas yang mengambil peran di era kebebasan tersebut adalah Hizbut Tahrir Indonesia atau lebih dikenal dengan istilah HTI. Adapun akar sejarahnya HT didirikan oleh Syaikh Taqiyuddin Al-Nabhani pada tahun 1953 di Palestina. Pendirian HT dilatar secara historis dan normatif. Secara historis, yakni kondisi keterpurukan ummat Islam diberbagai belahan dunia akibat penjajahan barat dalam waktu yang cukup lama. Adapun secara normatif, kelahiran HT merupakan upaya para pendirinya untuk menjalankan perintah Allah untuk berdakwah secara terorganisir dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar².

Tidak dipungkiri bahwa HT merupakan salah satu gerakan Islam komtemporer yang mendunia. Namun sedikit berbeda dengan gerakan Islam lainnya, HT menyebut organisasinya sebagai partai politik. Meskipun juga berbeda dengan partai politik yang ada diberbagai Negara. Dimana HT merupakan partai politik Islam yang bersifat

¹ Diakses dari situs mediaonline www.cnnindonesia.com dengan judul “mendagri tjahjo sebut indonesia sebagai negara ormas” pada hari senin pukul 14.00 wib

² Taqiyuddin al-Nabhani, Al-Takattul al-Hizbi (Al-Quds: Hizb al-Tahrir, 2001), hlm 4.

transnasionalisme. Tentu hal ini terkait dengan cita-cita politiknya yang ingin mewujudkan persatuan seluruh Negara Islam dalam satu sistem kekuasaan politik yang dikenal dengan konsep khilafah.³

HT mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam beberapa dasawarsa terakhir. Disebutkan bahwa HT telah berdiri di 40 negara, termasuk negara besar seperti Inggris, Jerman, Amerika Serikat, dan Negara-negara pecahan Uni Soviet. Adapun pola perjuangan HT sangat khas disbanding dengan pola gerakan Islam lainnya. Mereka seringkali membentuk konfrontasi dengan pihak pemerintah. Sangat berbeda misalnya dengan kelompok Islam Ikhwanul Muslimin yang sering bersikap adaptif dan kooperatif dengan para penguasa setempat. Hal ini menjadi ciri yang membuat HT semakin popular ditengah masyarakat. Karena dianggap gerakan Islam alternatif yang dapat menjawab kegagalan gerakan Islam selama ini.⁴

Di Indonesia, gerakan HT menamakan diri yakni Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). HTI secara resmi mendapat pengakuan oleh negara pada tahun 2006, yakni pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sejak itu HTI terdaftar di Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kemendagri dengan nomor 44/D.III.2/VI/2006 yang berbentuk organisasi sosial keagamaan. Dalam asas organisasinya disebutkan bahwa HTI merupakan gerakan Islam di NKRI yang berdasarkan Pancasila. Setelah resmi diakui oleh negara, maka sejak itulah, Indonesia menjadi satu-satunya negara yang secara resmi mengakui HT.⁵

Dengan mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah tersebut, disatu sisi HTI semakin aktif mengkampanyekan ide tentang pentingnya ummat Islam di Indonesia kembali kepada Khilafah. Namun disisi lain, HTI juga terlibat aktif dalam memberikan kritik dimuka umum baik lewat media massa ataupun aksi demonstrasi terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan ummat Islam. Dalam menegakkan misinya, HTI cenderung tidak ingin mengambil jalur konstitusional, karena menurut

³ Mengenal Hizbut Tahrir dan Strategi Dakwah Hizbut Tahrir, Penerjemah Abu Afif dan Nur Khalish, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, Mei 2009), hlm. 3

⁴ Jamhari & Jajang Jahroni (Penyunting). Gerakan Salafi Radikal di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2004) hlm. 161 dan 163.

⁵ Ibid,

mereka tujuan akhir gerakan HTI untuk menegakkan system khilafah glonal yang terintegrasi dalam kedaulatan tunggal Negara Islam.⁶

Namun di dalam perjalannya, beberapa kelompok organisasi masyarakat menilai gerakan HTI mengarah kepada paham radikalisme. Dimana paham ini dianggap dapat mengancam eksistensi Pancasila dan UUD 1945. Bahkan dalam kegiatan yang dilaksanakan HTI dilapangan justru berbenturan dengan banyak pihak, baik dari kelompok Islam itu sendiri maupun dengan rezim pemerintah.

Salah satu ormas Islam yang cukup sering berbenturan dengan ide khilafah yang diusung HTI adalah Nahdatul 'Ulama (NU). Fakta empirik penolakan keras warga NU terhadap HTI terjadi di Kota Santri Jombang. Misalnya kegiatan deklarasi dan apel ratusan Banser NU membentangkan spanduk kesetian pada NKRI dan Pancasila serta mencoret lambang *khilafah* yang menjadi simbol HTI. Banser Jombang juga melakukan penertiban spanduk-spanduk *khilafah* yang ada di Jombang. Deklarasi tersebut turut diikuti oleh 20 Ormas.⁷

Selain itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga memberikan pandangan negatif terhadap ormas HTI. MUI berpendapat bahwa akhir-akhir ini ideologi Khilafah yang dikampanyekan oleh HTI bertentangan dengan Pancasila. Selain itu, HTI juga dianggap berupaya membenturkan nilai-nilai Islam dengan ideologi Pancasila. HTI tidak murni lagi menjadi sebuah gerakan keagamaan, namun telah berubah menjadi sebuah gerakan politik yang dapat membahayakan NKRI.⁸

Pada akhirnya pemerintahan Joko Widodo ikut terlibat memantau dan mengkaji ideologi Khilafah yang digaungkan oleh HTI. Pada kesimpulannya, Pemerintah juga menilai bahwa HTI tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Sehingga pada tanggal 19 Juli 2017 Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM secara resmi mencabut status badan hukum ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) berdasarkan Surat

⁶ Abdurrahman Wahid (2009) *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Transnasional di Indonesia*. Jakarta: The Wahid Institute. Hal. 154

⁷ Contoh-contoh penolakan lain kalangan *nadhliyin* terhadap HTI di Jombang adalah: penolakan dari Jaringan Santri Jombang (Jas Ijo) terhadap rencana mukhtamar Tokoh Umat HTI yang rencananya dilaksanakan 1 Juni 2016 (cnnindonesia.com, 30/04/2016), Penolakan GP Anshor atas rencana Diskusi Pendidikan oleh DPD II Muslimat HTI di Jombang, 27 April 2016 (faktualnews.co, 01 Mei 2017) dan lain-lain.

⁸ Hasil wawancara wartawan kompas.com dengan Wakil Sekretaris Komisi Hukum dan Perundang-undangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Erfandi. Diakses pada media online: kompas.com dengan judul "Menurut MUI, Ideologi dan Aktivitas HTI Bertentangan dengan Pancasila."

Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 Tahun 2017 tentang pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0028.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan HTI.

Salah satu alasan pembubaran ini dikarenakan aktivitas HTI dinilai mengancam kedaulatan politik negara. HTI mengusung ideologi Khilafah yang secara garis besar bersifat transnasional, yang berorientasi meniadakan *nation state* (negara bangsa). Fakta yang ada bahwa 20 negara (termasuk negara yang penduduknya mayoritas Islam seperti Turki, Arab Saudi, Pakistan, Mesir, Yordania dan Malaysia) sudah terlebih dahulu melarang kegiatan HTI di negara mereka.⁹

Akan tetapi, meskipun telah dibubarkan oleh pemerintah, banyak hipotesis yang menunjukkan bahwa gerakan eks HTI masih tetap berjalan. Salah satunya pernyataan langsung mantan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Rokhmat S Labib. Ia menyatakan bahwa pihaknya akan tetap melakukan kegiatan dakwah Islam di Indonesia karena Pemerintah hanya mencabut status badan hukum HTI, bukan melarang kegiatan dakwah Islam. Dakwah tidak dapat dihentikan oleh siapapun karena merupakan kewajiban setiap ummat muslim. Sehingga mereka akan tetap berdakwah meskipun pelaksanaannya berbeda dengan kondisi sebelumnya.¹⁰

Selain itu, hasil kajian Abdul dan Kiki menyebutkan bahwa, pasca dibubarkan ada dua langkah yang akan dilakukan oleh eks HTI. *Pertama*, HTI akan melakukan pembentukan ormas baru. *Kedua*, eks HTI akan bermetamorfosa menjadi partai baru atau beralih haluan berpindah dan bergabung kepada partai berbasis Islam yang sudah ada. Mereka akan mencari partai-partai yang secara ideologi sama atau mirip dengan ideologi HTI sebelumnya, seperti PKS, PPP, PAN dan PBB. Kondisi ini akan terjadi jika mereka gagal memperjuangkan dan mempertahankan ideologinya dalam bentuk ormas.¹¹

Dengan demikian, secara khusus penelitian bertujuan untuk mengkaji tentang

⁹ Lihat artikel Itok Dwi Kurniawan, dosen ppkn universitas sebelas maret Surakarta dengan judul “Pembubaran hizbut tahrir indonesia ditinjau dari Perspektif kewarganegaraan liberal dan Kewarganegaraan republic.” hlm. 4

¹⁰ Hasil wawancara wartawan CNN **Ramadhan Rizki Saputra** dengan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Rokhmat S Labib pada Rabu, 09/05/2018 06:25 WIB berita lengkap lihat : <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180508211216-32-296725/pembubaran-tak-hentikan-aktivitas-dakwah-hti>

¹¹ Abdul Qohar dan Kiki Muhamad Hakiki. *Eksistensi Gerakan Ideologi Transnasional HTI Sebelum dan Sesudah Pembubaran*. Jurnal Kalam UIN Raden Intan Lampung, Volume 11, Nomor 2, Desember 2017. Hlm 365.

dinamika gerakan sosial eks HTI setelah dibubarkan di provinsi Bengkulu. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk melakukan deteksi awal akan potensi gerakan radikalisme dalam kelompok keagamaan di Bengkulu. Dimana menurut survey BNPT nasional pada tahun 2017 provinsi Bengkulu ditetapkan sebagai wilayah tertinggi akan paham radikalisme di Indonesia. Dalam survey tersebut didapatkan angka potensi paham radikalisme di Provinsi Bengkulu sebesar 58,58 persen, disusul Provinsi Gorontalo 58,48 persen, Sulawesi Selatan 58,42 persen, Lampung 58,38 persen dan Kalimantan Utara 58,32 persen.¹²

Diharapkan hasil penelitian ini, dapat menjadi rujukan oleh pemerintah dalam membuat kebijakan untuk mengatasi konflik sosial secara nasional, baik antara sesama organisasi masyarakat ataupun antara ormas dengan negara yang dapat mengancam keutuhan NKRI.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja wadah perkumpulan eks HTI saat ini?
2. Bagaimana metode dakwah eks HTI saat ini?
3. Bagaimana langkah-langkah gerakan sosial eks HTI dalam menegakkan ideologinya kedepannya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Lembaga apa saja yang digunakan eks HTI sebagai wadah perkumpulan saat ini.
2. Untuk Mengetahui bagaimana metode dakwah eks HTI saat ini.
3. Untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah gerakan sosial eks HTI dalam menegakkan ideologinya kedepan.

¹² Lihat berita lengkap di situs berita online : <https://bengkuluekspress.com/potensi-radikalisme-di-bengkulu-capai-5858-persen/>

D. Manfaat Penelitian

Secara akademis, manfaat penelitian ini berguna bagi pengembangan Prodi yang terkait, misalnya Prodi IPS di Fakultas Tarbiyah dan Prodi Manajemen Dakwah di Fakultas Ushuludin, Adab dan Dakwah IAIN Bengkulu., khususnya mata kuliah Dinamika Konflik Sosial ataupun Metode Dakwah Islam.

Secara praktis, kegunaan penelitian ini adalah sebagai panduan bagi para pengambil kebijakan, khususnya pemerintah dan organisasi ke-Islaman dalam mencegah proses radikalisasi dalam kelompok Islam serta sebagai rujukan dalam pengelolaan konflik sosial berbasis agama yang terjadi dimasyarakat agar tidak menimbulkan perpecahan yang dapat mengancam keutuhan NKRI.

E. Penelitian Terdahulu

Kajian tentang HTI telah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, diantaranya Dwi pada tahun 2017 yang berjudul “Manifestasi Politik Identitas HTI dikalangan Nadliyin : Studi Kasus HTI di Kabupaten Jombang.” Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dalam rangka untuk mendapatkan simpati dari kalangan Nadliyin, HTI telah banyak melakukan penyesuaian dalam manifestasi politik mereka di kalangan Nadliyin. Baik penyamaan dalam bidang paham keagamaan, mengikuti budaya keagamaan seperti penghormatan kepada kiayai layaknya kalangan Nadliyin pada umumnya. Namun demikian, pada dasarnya HTI tetap konsisten terhadap ide yang mereka usung yaitu berupaya menegakkan kembali khilafah Islam di muka bumi.¹³

Selain itu, Abdul dan Kiki pada tahun 2017 juga melakukan kajian terhadap HTI dengan judul “ Eksistensi Gerakan Ideologi HTI Sebelum dan Sesudah Pembubarannya.” Hasil penelitian menemukan bahwa : Pertama, ada beberapa cara perjuangan politik identitas yang dilakukan oleh HTI. Diantaranya melalui demonstrasi, menyelenggarakan seminar atau diskusi public, publikasi lewat media massa serta melakukan pendekatan pada tokoh dan lembaga pendidikan. Adapun pola rekrutmen

¹³ Dian Dwi Jayanto tentang. *“Manifestasi Politik Identitas HTI di Kalangan Nadliyin : Studi Kasus HTI di Kabupaten Jombang.”* Skripsi mahasiswa Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UNAIR, 2017.

yang mereka lakukan yakni dengan melakukan pendekatan interpersonal, setelah itu menyelenggarakan halaqoh sebagai sarana indoktrinasi. *Kedua*, setelah HTI resmi dibubarkan oleh pemerintah, maka ada dua alternatif jalan yang akan mereka tempuh, yakni membentuk ormas baru sebagai wadah pengganti HTI atau membuat partai politik baru jika tidak memungkinkan bergabung dengan partai politik Islam yang sudah ada saat ini seperti PKS, PPP, PAN dan PBB. Pilihan kedua akan diambil jika gagal mewujudkan pilihan pertama.¹⁴

Selanjutnya, Itok Dwi Kurniawan pada tahun 2018 juga melakukan kajian tentang HTI dengan judul “Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia ditinjau dari Perspektif Kewarganegaraan Liberal dan Kewarganegaraan Republik. Hasil penelitian menemukan bahwa jika ditinjau dari perspektif kewarganegaraan liberal, kebijakan pemerintah melakukan pembubaran terhadap ormas HTI statusnya tidak sah. Dikarenakan Perpu yang diterbitkan pemerintah dapat dijadikan alat pengekangan serta merenggut kebebasan dalam berorganisasi. Akan tetapi jika dilihat dari perspektif kewarganegaraan republikanisme, pembubaran terhadap HTI sah-sah saja. Hal ini didasari bahwa ide dan gagasan yang diusung HTI dianggap tidak sejalan dengan hukum Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Jika tidak sejalan dengan cita-cita, bisa dianggap patriotisme anggota HTI sangatlah kurang sehingga layak untuk dibubarkan.¹⁵

Ketiga penelitian terdahulu tersebut dijadikan referensi oleh peneliti. Namun, tentu saja penelitian yang akan dilakukan ini berbeda dengan penelitian-penelitian diatas. Penelitian ini tidak meneliti ketersinggungan antara HTI dengan NU sebagaimana yang dilakukan oleh Dian Agus Julianto. Tidak juga mengoreksi kebijakan pemerintah terkait pembubaran HTI sebagaimana dilakukan oleh Itok Dwi Kurniawan. Penelitian Abdul Qohar dan Kiki Muhamad Hakiki lebih memiliki kemiripan dengan penelitian yang dilakukan ini. Hanya saja penelitian ini memiliki kajian yang lebih dalam. Jika Abdul dan Kiki hanya mengkaji eksistensi HTI di

¹⁴ Abdul Qohar dan Kiki Muhamad Hakiki. “*Eksistensi Gerakan Ideologi Transnasional HTI Sebelum dan Sesudah Pembubaran*. Jurnal Kalam UIN Raden Intan Lampung, Volume 11, Nomor 2, Desember, 2017.

¹⁵ Itok Dwi Kurniawan. “*Pembubaran hizbut tahrir indonesia ditinjau dari Perspektif kewarganegaraan liberal dan Kewarganegaraan republic.*” Dosen Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2018.

Indonesia sebelum dan setelah pembubaran terkhusus di provinsi Lampung, maka penelitian ini lebih fokus mengkaji tentang wadah apa yang digunakan saat ini, bagaimana metode dakwah serta langkah-langkah politik Eks HTI setelah dibubarkan oleh pemerintah khususnya di wilayah Provinsi Bengkulu.

F. Kerangka Teoritis

Penelitian yang kami lakukan ini menggunakan kerangka teori gerakan social Sidney Tarrow. Memang dalam kajian tentang gerakan social, ruang lingkup kajiannya cukup luas. Sehingga beragam pakar telah menjelaskan tentang konsep gerakan social (social Movement). Salah satunya adalah sosiolog Anthony Giddens. Ia menyatakan bahwa gerakan social merupakan suatu upaya bersama suatu kelompok masyarakat untuk mencapai tujuan bersama atau suatu gerakan untuk mencapai tujuan didasari tindakan kolektif di luar lembaga-lembaga formal.¹⁶

Jika melihat konsep gerakan sosial dari Giddens tersebut, ia menyatakan bahwa gerakan sosial adalah sebuah gerakan yang dilakukan secara bersama-sama demi mencapai tujuan yang diinginkan oleh kelompok atau dengan kata lain gerakan sosial adalah tindakan kolektif untuk mencapai keinginan yang menjadi cita-cita bersama.

Konsep gerakan social menurut Giddens diatas sedikit berbeda dari perspektif gerakan social Sidney Tarrow. Menurut Tarrow, gerakan sosial dimaknai sebagai usaha perlawanan kelompok kelompok masyarakat yang menggalang kekuatan secara politik untuk menentang kebijakan para elit pemegang otoritas yang dianggap merugikan kepentingan mereka.

Konsep gerakan sosial yang didefinisikan oleh Tarrow tersebut memiliki perbedaan dengan definisi Giddens bahwa yang dimaksud dalam gerakan sosial dalam perspektif Tarrow ini adalah dia lebih memfokuskan pada aspek sosial politik dimana dalam pernyataannya gerakan sosial ia definisikan sebagai sebuah tindakan perlawanan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat atau warga biasa yang bergabung dan membentuk alienasi dengan para tokoh atau kelompok yang memiliki pengaruh besar dalam suatu negara, kelompok atau semacamnya bersama-sama

¹⁶ Fadillah Putra Dkk. Gerakan Sosial. (Malang. Averrors Press. 2006) hlm 3

bergerak untuk melakukan suatu perlawanan terhadap para pemegang kekuasaan atau para elit politik jika apa yang menjadi sebuah kebijakan dirasa tidak sesuai dengan apa yang diinginkan.

Konsep gerakan sosial menurut Tarrow ini bisa kita ambil contoh dalam peristiwa gerakan reformasi di Indonesia pada tahun 1998. Dimana seluruh elemen masyarakat melakukan gerakan bersama secara serentak diseluruh wilayah Indonesai dengan tujuan yang sama yaitu melengserkan presiden Soeharto sebagai kepala Negara. Dalam peristiwa ini, kelompok masyarakat yang menjadi korban dari kebijakan pemerintah bergabung dengan kelompok mahasiswa bersama-sama melakukan suatu upaya perlawanan untuk menurunkan pemerintahan yang sedang berkuasa, dalam hal ini adalah presiden.

Dalam konteks penelitian kali ini, teori yang digunakan adalah teori gerakan sosial dari Tarrow yang oleh peneliti dianggap relevan dengan realitas dan data yang ditemukan dalam penelitian di lapangan karena dalam penelitian ini ada sebuah perlawanan dari sekelompok masyarakat yang merasa sebuah kebijakan atau rencana yang dikemukakan oleh pemegang kekuasaan yang dalam hal ini adalah Presiden dianggap tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh organisasi masyarakat, orang-orang yang tergabung dalam sebuah gerakan ini pada dasarnya adalah orang-orang yang sedikit banyak paham dan mengetahui tentang permasalahan yang ada sebelumnya.

Dalam konteks gerakan sosial dari Tarrow, tindakan yang didasari politik perlawanan adalah aksi kolektif yang melawan (contentious collective action). Tindakan kolektif bisa mengambil banyak bentuk, yang singkat maupun yang berkelanjutan, terlembaga atau cepat bubar, membosankan atau dramatis. Umumnya tidak kolektif berlangsung dalam institusi ketika orang-orang yang tergabung di dalamnya bertindak untuk mencapai tujuan bersama.

Menurut Syahrial, gerakan sosial dapat terjadi secara formal dan legal di tengah masyarakat, namun dapat pula terjadi secara nonformal dan illegal dalam wujud kelompok bawah tanah (underground groups). Akan tetapi, suatu tindakan kolektif dapat didefinisikan sebagai gerakan sosial, maka ia harus memenuhi unsur-unsur

berikut diantaranya suatu tindakan kolektivitas bersama, tujuan yang ingin dicapai adalah perubahan tertentu dalam masyarakat, kemudian kolektivitasnya relatif tersebar namun lebih rendah derajatnya daripada organisasi formal, serta tindakannya mempunyai derajat spontanitas relatif tinggi namun tak terlembaga dan bentuknya tak konvensional.¹⁷

G. Metode Penelitian :

Pendekatan, Jenis dan Metode Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dimana data yang dikumpulkan mayoritas berbentuk kata-kata atau gambar, bukan dalam olahan angka-angka.¹⁸ Dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, maka kita mengkaji sebuah fenomena berdasarkan sudut pandang subyek penelitian, bukan kacamata kuda si peneliti.¹⁹

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan wawasan tentang sesuatu yang baru sedikit diketahui yaitu tentang bagaimana gerakan sosial eks HTI pasca pembubarannya oleh pemerintah khususnya di Provinsi Bengkulu. Peneliti mengharapkan dengan menggunakan pendekatan kualitatif akan didapatkan rincian data yang lebih kompleks.

Adapun jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian mendalam mencakup keseluruhan yang terjadi di lapangan dengan tujuan untuk mempelajari secara mendalam tentang latar belakang keadaan sekarang dari subyek penelitian.²⁰ Metode yang digunakan dalam penelitian menggunakan metode deskritif, yakni suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia atau objek situasi dan kondisi.²¹

¹⁷ Syahrial Syarbaini. Dasar-Dasar Sosiologi. (Yogyakarta. Graha Ilmu. 2013) hlm 156

¹⁸ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif (Rancangan Metodelogi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora)* Cetakan ke-1, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hal. 58.

¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian kualitatif*, (Jakarta: Rosda Karya, 2007), hal. 6.

²⁰ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif (Aktualisasi Metodologi Kearah Ragam Varian Kontemporer)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal.10.

²¹ Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hal. 54.

Informan Penelitian.

Informan adalah orang yang memberikan informasi kepada peneliti. Dengan pengertian ini maka informan dapat dikatakan sama dengan responden, apabila pemberian keterangannya dipandang penting oleh pihak peneliti.²² Pada penelitian ini teknik yang digunakan dalam pemilihan informan adalah teknik *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* yaitu menentukan informan dengan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal. *Purposive Sampling* adalah teknik yang digunakan peneliti jika peneliti mempunyai petimbangan-pertimbangan tertentu dalam pengambilan atau penentuan sampel.²³

Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai informan yaitu: *pertama*, informan utama dan informan pendukung. Informan utama dalam penelitian ini adalah eks pengurus dan anggota cabang HTI di provinsi Bengkulu. Adapun informan pendukung dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang mengetahui seluk-beluk organisasi HTI, seperti pihak pemerintah, pimpinan ormas Islam ataupun masyarakat umum.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam rentang waktu empat bulan, yakni dimulai pada bulan Juli 2021 hingga bulan November 2021. Adapun penelitian ini dilakukan di wilayah provinsi Bengkulu, khususnya di Kota Bengkulu.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik penumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan adalah wawancara mendalam, observasi serta dokumentasi. Wawancara mendalam adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan bertatap muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada peneliti.²⁴ Dalam penelitian ini, peneliti akan

²² Saiffudin dan Arikunto, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal.145.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R & D cetakan ke-7*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal. 218.

²⁴ Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatitif*, hal. 64.

melakukan wawancara mendalam kepada informan dengan membuat daftar pertanyaan (pedoman pertanyaan) terlebih dahulu, yang tidak bersifat ketat dan dapat dirubah peneliti.²⁵

Adapun teknik observasi merupakan upaya pengamatan atau penginderaan langsung terhadap suatu benda, kondisi, proses atau perilaku. Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejalah yang diselidiki.²⁶ Observasi dapat dilakukan dengan dua cara, sistematis dan non-sistematis. Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi dengan cara observasi non-sistematis atau tanpa menggunakan instrumen pengamatan.

Selanjutnya menggunakan teknik dokumentasi. Dokumentasi dalam penelitian ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian. Menurut Arikunto dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis yaitu dengan membaca dan mempelajari dokumentasi, buku-buku, data kearsipan yang berhubungan dengan penelitian.²⁷ Dokumentasi meliputi buku-buku, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto dan dokumen lainnya yang terkait dengan fenomena penelitian.

Teknik Analisis Data

Menganalisis hasil penelitian berarti kita melakukan kajian yang komprehensif terhadap temuan-temuan dilapangan dan dihubungkan dengan teori-teori yang relevan. Menurut Sugiyono analisis kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengamatan (observasi), wawancara, catatan lapangan, dan studi dokumentasi, mengorganisasikan data kesintesis menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang

²⁵ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif, (Aktualisaasi Metodelogis Kearah Ragam Varian Kontemporer)*, hal.102.

²⁶ Narbuko dkk, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hal. 70.

²⁷ Saiffudin dan Arikunto, *Metode Penelitian*, hal. 158.

akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²⁸

Pada umumnya dalam penelitian kualitatif, analisis data dapat dilakukan dalam dua model yang sudah baku yaitu analisis model *Miles* dan *Huberman* dan analisis model *Spydley*. Adapun penelitian ini menggunakan analisis data model *Miles* dan *Huberman* dengan melakukan reduksi data (pengumpulan data), kemudian melakukan penyajian data serta proses pengambilan kesimpulan. Data yang disimpulkan berpeluang untuk menerima masukan. Penarikan kesimpulan sementara, masih dapat diuji kembali dengan data di lapangan.²⁹

H. Sistematika Penulisan

Untuk lebih sistematisnya penulisan dalam penelitian ini, penulis membagi dalam beberapa Bab, yaitu :

BAB I merupakan bab Pendahuluan yang menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan dan Batasan Masalah, Penjelasan Judul, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II merupakan bab landasan teoritis menjelaskan tentang Organisasi HTI, mulai Sejarah HTI di dunia, kelahiran HTI di Indonesia, Paham Keagamaan HTI, proses rekrutmen HTI, Metode Dakwah HTI.

BAB III membahas tentang Metodologi penelitian terdiri atas, jenis pendekatan penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data serta teknik keabsahan data.

BAB IV Membahas tentang pembahasan hasil penelitian meliputi Wadah apa saja yang digunakan eks HTI Bengkulu sebagai alat perkumpulan saat ini. Kemudian Bagaimana metode dakwah eks HTI saat ini, serta Bagaimana langkah-langkah gerakan eks anggota HTI Bengkulu dalam menegakkan ideologinya kedepannya.

²⁸ Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R & D*, hal. 58.

²⁹ Iskandar, *Metodelogi Pendidikan dan Sosial, (Kuantitatif dan Kualitatif)*, hal. 223.

BAB V memuat tentang Kesimpulan dan Saran-saran diantaranya, apa saja yang terjadi dengan eks anggota HTI saat ini serta kebijakan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam rangka merangkul eks anggota HTI kedepan agar tidak terjadi konflik vertikal dan horizontal di NKRI.

I. Pustaka Acuan/ Bibliografi

- Abdul Qohar dan Kiki Muhamad Hakiki. "*Eksistensi Gerakan Ideologi Transnasional HTI Sebelum dan Sesudah Pembubaran*." Jurnal Kalam UIN Raden Intan Lampung, Volume 11, Nomor 2, Desember, 2017.
- Abdurrahman Wahid. "*Ilusi Negara Islam : Ekspansi Gerakan Transnasional di Indonesia*." Jakarta : The Wahid Institute, 2009.
- Abu Afif dan Nur Khalish. "*Mengenal Hizbut Tahrir dan Strategi Dakwah Hizbut Tahrir*" Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2009.
- Agus Salim. "*The Rise of Hizbut Tahrir Indonesia (1982-2004) : Its Political Opportunity Structure, Resource Mobilization, and Collective Action Frames*." Syarif Hidayatullah State Islamic University, 2005.
- Al-Nabhani, Taqiyuddin, At-Takattul Al-Hizbiy." Jakarta : Hizbut Tahrir Indonesia, 2001.
- Azman. "Gerakan Dan Pemikiran Hizbut Tahrir Indonesia." Jurnal Ad-Daulah, Vol. 7 / No. 1 / Juni, 2018.
- Dian Dwi Jayanto tentang. "*Manifestasi Politik Identitas HTI di Kalangan Nadliyin : Studi Kasus HTI di Kabupaten Jombang*." Skripsi mahasiswa Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UNAIR, 2017.
- Fadillah Putra Dkk. "*Gerakan Sosial*." Malang : Averrors Press, 2006.
- Greg Fealy. "*Hizbut Tahrir in Indonesia: Seeking a "Total" Islamic Identity*". Edited by Shahram Akbarzadeh dan Fethi Mansouri. London and New York : Tauris Academic Studies, 2007.
- Hizbut Tahrir. "*Mengenal Hizbut Tahrir : Partai Politik Islam Ideologis*." Jakarta : Pustaka Thariqul Izzah, 2000.
- Itok Dwi Kurniawan. "*Pembubaran hizbut tahrir indonesia ditinjau dari Perspektif kewarganegaraan liberal dan Kewarganegaraan republic*." Dosen Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2018.
- Jamhari & Jajang Jahroni. "*Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*." Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004.
- Mohamad Rafiuddin. "*Mengenal Hizbut Tahrir*" (*Studi Analisis Ideologi Hizbut Tahrir vis a vis NU*). Jurnal Islamuna Volume 2 Nomor 1 Juni, 2015.
- Sudarwan Danim. "*Menjadi Peneliti Kualitatif (Rancangan Metodelogi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*." Bandung : Pustaka Setia, 2002.
- Sugiyono. "*Metode Penelitian Kualitatif dan R & D*." Bandung: Alfabeta, 2009.
- Syahrial Syarbaini. "*Dasar-Dasar Sosiologi*." Yogyakarta. Graha Ilmu, 2013.

cnnindonesia.com
faktualnews.co
<https://bengkuluekspress.com>

J. Timeline Penelitian

NO	KEGIATAN	BULAN				
		Juli 2021	Agustus 2021	Septembet 2021	Oktober 2021	November 2021
1	Pembuatan dan penyerahan proposal penelitian	Red	Blue	Blue	Blue	Blue
2	Seminar Proposal & perbaikan	Red	Blue	Blue	Blue	Blue
3	Melakukan tahapan penelitian (pengumpulan data) primer/ sekunder (wawancara, observasi dan dokumentasi)	Blue	Red	Blue	Blue	Blue
5.	Tahapan penulisan (analisis, sintesis, penggunaan teori)	Blue	Blue	Red	Blue	Blue
7	Seminar hasil	Blue	Blue	Blue	Red	Blue
8	Cetak hasil dan laporan	Blue	Blue	Blue	Blue	Red